

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki letak geografis yang strategis serta keragaman suku dan budaya yang melimpah. Dengan begitu, Indonesia dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui sektor pariwisata. Pariwisata yang menjadi salah satu industri penting di dunia yang mempunyai kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi di banyak negara termasuk Indonesia.¹ Dalam kurun waktu 3 tahun pada tahun 2015 hingga tahun 2017 peningkatan jumlah wisatawan Indonesia meningkat 10% tiap tahunnya dan menyalurkan devisa negara sebanyak 7,2% tiap tahun.² Devisa merupakan seluruh barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional dengan 2 jenis yakni, devisa umum dan devisa kredit. Devisa umum adalah jenis devisa yang diperoleh tanpa ada kewajiban untuk mengembalikannya, misalnya Ekspor, penyelenggaraan jasa-jasa dan lain-lain. Sedangkan devisa kredit adalah devisa yang bisa diperoleh dengan syarat untuk mengembalikan, misalnya pinjaman luar negeri.³

Dengan peningkatan pendapatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dari tahun 2015, pemerintah terus mengupayakan peningkatan melalui

¹ Prasetyo, Bagus. *Hingga Mei 2016, Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Capai 4,33 Juta*, diakses melalui <https://www.tempo.co/topik/lembaga/254/kementerian-pariwisata-dan-industri-kreatif> (28/11/2016.19.00)

² www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2959 (10/05/2018.08.00)

³ Jimmy Benny, *Ekspor dan Impor Pengaruhnya Terhadap Cadangan Devisa di Indonesia*, Jurnal EMBA 1407 Vol.1 No.4 (2013)

pemberian fasilitas guna menarik minat para wisatawan. Salah satu fasilitas yang diberikan adalah pemberlakuan kebijakan bebas visa.

Kebijakan bebas visa adalah suatu kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan Indonesia. Kebijakan sendiri adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih individu maupun negara untuk mengambil suatu keputusan.⁴ Sedangkan Visa adalah suatu dokumen yang dikeluarkan oleh suatu negara sebagai syarat atau izin untuk berkunjung ke negara tersebut.⁵ sehingga kebijakan bebas visa dapat diartikan sebagai suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara mengenai ijin berkunjung maupun tinggal di suatu negara tersebut.

Indonesia telah menerapkan kebijakan bebas visa dan sempat beberapa kali mengalami perubahan sejak pertama kali disahkan, pada tahun 2003 di era kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, melalui keputusan presiden nomor 18 tahun 2003 bebas visa diberlakukan untuk 11 negara kemudian pada tahun 2011 pada peraturan nomor 43 tahun 2011 bertambah menjadi 30 negara. Dalam Peraturan Presiden nomor 69 tahun 2015 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juni tahun 2015 negara penerima fasilitas bebas visa bertambah menjadi 45 negara. Peraturan nomor 104 tahun 2015 pada 18 September tahun 2015 menjadi 75. Hingga pada keputusan terakhir yang dikeluarkan pada 2 Maret tahun 2016 melalui Peraturan Presiden nomor 21 Tahun 2016 menjadi 169 negara.⁶

⁴ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2005, hal 7, lihat juga <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Karya%20B-Buku%20Dasar-dasar%20Kebijakan%20Publik.pdf>

⁵ Ahmad Jazuli, *Implementasi kebijakan Bebas Visa dalam perspektif Keimigrasian*, Jurnal Ilmiah Hukum Internasional, Volume 10, Nomor 3 (2016)

⁶ http://pih.kemlu.go.id/files/Perpres_21_thn_2016_tentang_Bebas_Visa_Kunjungan.pdf (25/01/2018.19.30)

Dalam Peraturan Presiden nomer 21 tahun 2016 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2016 berisi 8 pasal yang salah satunya di pasal 3 menjelaskan bahwa penerima kebijakan bebas visa dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan Indonesia dengan ketentuan melalui tempat pemeriksaan imigrasi tertentu.⁷

Adapun beberapa negara yang telah tercatat dalam daftar penerima kebijakan bebas visa diantaranya Australia, Brazil, Jepang, Inggris, Afrika Selatan, Hongkong, Belanda, Jerman, Kamboja, Kenya, Meksiko, Rusia, Swiss, Spanyol, Thailand, Timor Leste, Singapura, Turki, Vietnam, Swedia, Prancis, Mesir, Malaysia, Italia dan 144 negara lainnya.⁸

Pemerintah berhasil menaikkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia selama Januari-Desember 2015 melampaui target dari angka 10.017.000 menjadi 10.406.759 atau sekitar 7,2 %.⁹ Dari angka tersebut, perolehan devisa pariwisata mencapai 11,9 miliar dollar AS atau setara Rp 163 triliun dengan perhitungan rata-rata lama tinggal wisatawan selama berlibur di Indonesia adalah 40 hari dengan pengeluaran sebanyak 1.190 dollar AS per kunjungan.¹⁰

Disisi lain dengan banyaknya keuntungan yang didapat, tidak menutup kemungkinan negara juga akan mengalami kerugian. Beberapa kritik menyebutkan alasan negara akan mengalami kerugian disebabkan oleh faktor keamanan, karena semakin banyak negara menambah daftar negara penerima bebas visa maka akan

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Akuntono, Indra. *Kebijakan Bebas Visa Jokowi, Untung Atau Rugi?*, Diakses melalui <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/16/07161781/Kebijakan.Bebas.Visa.Jokowi.Untung.atau.Rugi> (30/11/2016.18.00)

¹⁰ Ibid.

semakin sulit untuk pemerintah mengawasi keluar masuknya wisatawan asing dan hal tersebut tentu akan menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah perizinan.¹¹ Ditemukan pelanggaran yang dilakukan beberapa negara tentang perizinan. Tercatat China melakukan pelanggaran terbanyak yakni 1.180 pelanggaran terhitung pada bulan Januari-Juli 2016 sedangkan total pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa negara lain tercatat sebanyak 2.856 kasus.¹²

Indonesia terus berupaya untuk memberikan fasilitas kebijakan bebas visa dan menambah kuota negara-negara penerimanya. Terlebih dalam kurun waktu satu tahun terakhir di tahun 2015-2016 melalui Peraturan Presiden nomer 21 tahun 2016, jumlah negara penerima kebijakan terus bertambah. Hal tersebut sangat perlu untuk diperhatikan, sehingga negara dapat mengoptimalkan tujuan dari diberlakukannya kebijakan bebas visa. Dengan keuntungan dan kerugian yang akan didapat, mengapa Indonesia masih memberikan fasilitas kebijakan bebas visa dan menambah kuota negara-negara penerimanya meskipun sudah diketahui bahwa bukan hanya keuntungan namun kerugian juga ditargetkan akan didapatkan oleh negara. Dalam hal ini, penulis tertarik meneliti alasan mengapa Indonesia menambah jumlah daftar negara penerima kebijakan bebas visa dengan sangat signifikan di tahun 2016.

¹¹ Ibid.

¹² *Kebijakan Bebas Visa Butuh Evaluasi*. Diakses melalui <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/07/kebijakan-bebas-visa-butuh-evaluasi> (30.11.2016.18.30)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diambil yaitu, Mengapa Indonesia meningkatkan jumlah negara penerima kebijakan bebas visa tahun 2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menjelaskan alasan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pemerintah Indonesia menambah jumlah negara penerima fasilitas kebijakan bebas visa 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan, informasi dan wawasan bagi pembaca dalam memahami kebijakan bebas visa serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemerintah Indonesia sehingga Kebijakan Bebas Visa Kunjungan terus mengalami perubahan, salah satunya adalah dengan menambahkan daftar negara penerima kebijakan bebas visa di tahun 2016.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana terhadap institusi pembuat kebijakan luar negeri dan dapat menjadi salah satu sumber dalam

proses akademis seperti proses belajar mengajar, pengerjaan tugas, maupun penulisan karya ilmiah lainnya, khususnya untuk memberikan gambaran mengapa kebijakan bebas visa dikeluarkan.

1.5 Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi dengan judul **Analisa Kebijakan Pembatalan Intervensi Militer Amerika Serikat ke Suriah di Era Barack Obama** oleh **Sinta Kartika**.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian eksplanatif dengan teori kebijakan luar negeri *Adaptive Model Of Foreign Policy*. Peneliti menjelaskan keadaan Amerika dalam masa kepemimpinan Barack Obama pada saat itu akhirnya membatalkan rencana intervensi militernya kepada Suriah karena adanya faktor perubahan eksternal dan tuntutan internal didalamnya. Faktor eksternal yaitu ancaman terhadap sekutu Amerika Serikat seperti Turki dan Israel karena keterlibatan organisasi terorisme internasional seperti ISIS dan al-Nusra yang mencoba memanfaatkan konflik sipil di Suriah dan kekecewaan Amerika Serikat terhadap negara *free-rider* yang mendapatkan keuntungan dalam intervensi militer meskipun tidak banyak berkontribusi dalam intervensi. Sedangkan faktor internalnya adalah tuntutan dari masyarakat Amerika Serikat melalui kongres dan juga demonstrasi NGO maupun rakyat sipil yang menolak keterlibatan Amerika Serikat dalam intervensi militer dan konflik sipil Suriah.

Persamaan dari penelitian ini keduanya menggunakan teori kebijakan luar negeri untuk menganalisis kasus atau fokus penelitian yang diambil yakni alasan pemerintah membatalkan intervensi militer Amerika Serikat ke Suriah dengan

alasan pemerintah menambah daftar negara penerima kebijakan bebas visa namun perbedaannya terletak pada pola atau model klasifikasi yang digunakan. Yakni *Preservative Adaptation* yang menjelaskan adanya faktor internal dan eksternal dan *Intrasignment Adaptative* yang hanya mempunyai faktor internal saja¹³

Kedua, skripsi dengan judul **Pengaruh Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Indonesia Terhadap Daya Saing Pariwisata Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara** oleh **Maria Imelda**. Penelitian ini menjelaskan tentang potensi Pariwisata Indonesia yang menjadi sektor prioritas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan banyaknya potensi tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan paket kebijakan, salah satu kebijakannya adalah Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS). Tercatat 169 negara yang menerima fasilitas bebas visa yang sebagian besarnya merupakan kawasan Asia Tenggara.

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan adalah salah satu inovasi pemerintah untuk meningkatkan sektor pariwisata dengan tujuan menganalisis pembentukan dan pelaksanaan kebijakan bebas visa kunjungan singkat di Indonesia melalui kebijakan ini, serta menganalisis dampak yang timbul dari penerapan kebijakan bebas visa kunjungan singkat.

Fokus penelitian yang diambil oleh peneliti dalam kajiannya sama dengan fokus penelitian dalam penelitian terdahulu yang diambil, yakni menjelaskan dampak positif dari penerapan kebijakan bebas visa, dilihat dari kunjungan

¹³ Sinta Kartika Kusuma Dewi, 2018, *Analisa Kebijakan Pembatalan Intervensi Militer Amerika Serikat ke Suriah di Era Barack Obama*, Skripsi, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

wisatawan mancanegara yang berkunjung semakin meningkat. Sedangkan perbedaan yang peneliti ambil adalah faktor yang mempengaruhi kebijakan bebas visa menambah daftar negara penerima fasilitas ini, namun dalam penelitian terdahulu yang diambil objek penelitiannya adalah pengaruh kebijakan bebas visa¹⁴

Ketiga, Jurnal oleh **Abd Muis** yang berjudul **Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan (Studi Pengembangan Ekowisata Di Kabupaten Penajam Paser Utara)**. Dalam jurnal ilmiah ini menggunakan jenis penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian peran dinas pariwisata serta faktor pendukung serta penghambat peran pemerintah tersebut. melalui beberapa indikator yakni motivator, fasilitator, dan dinamisator, dijelaskan bahwa setiap objek memiliki peranan masing-masing. Adapun peranan sebagai berikut; motivator (dinas pariwisata) mempunyai kewajiban melakukan perkembangan pariwisata, dengan mengelola aset seni budaya daerah, nilai tradisi, situs sejarah serta mengenalkan potensi daerah wisata Penajam Paser Utara. Kedua, Fasilitator sebagai penanggung jawab perkembangan potensi pariwisata tentunya Dinas Pariwisata perlu menyediakan fasilitas sarana dan prasarana. Ketiga, Dinamisator memperluas jaringan untuk diajak kerjasama baik pihak swasta maupun masyarakat.

Dalam jurnal ini dijelaskan peranan apa saja yang berpengaruh dalam peningkatan pembangunan suatu daerah yang berkaitan dengan salah satu faktor

¹⁴ Maria Imelda Ayudihta Loda, 2016, *Pengaruh Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Indonesia Terhadap Daya Saing Pariwisata Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara*, Skripsi, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pasundan Bandung.

internal dalam penelitian yang sedang peneliti bahas, yakni untuk mengembangkan pembangunan suatu negara maka diperlukan kerjasama serta inovasi untuk menciptakan karya yang dapat menarik wisatawan asing. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, pada penelitian terdahulu yang diambil, peneliti yang menganalisa peran pemerintah dalam peningkatan pariwisata dan dalam penelitian yang sedang diteliti berfokus pada alasan pemerintah menambah daftar negara dalam kebijakan yang diberikan¹⁵

Keempat, jurnal berjudul **Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Cadangan Devisa Di Indonesia (Studi Sebelum dan Sesudah Krisis Global)** oleh **Luh Made Trisna Meita Murni Lestari dan I Wayan Yogi Swara**. Dijelaskan bahwa cadangan devisa ibarat tabungan bagi negara yang berfungsi untuk transaksi dan digunakan untuk membiayai neraca pembayaran, melakukan intervensi di pasar untuk memelihara nilai tukar hingga menjadi pengatur permintaan dan penawaran valuta asing yang tidak seimbang. Cadangan devisa sendiri tidak hanya berasal dari transaksi berjalan namun juga transaksi modal. Berdasarkan penelitian 2005-2014 dengan data kuartal diketahui bahwa ekspor neto, kurs dolar Amerika berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan devisa. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menjanjikan negara dapat terhindar dari krisis, namun cadangan tersebut dapat berfungsi sebagai bantalan ekonomi. Dengan menggunakan data sekunder dan dianalisis dengan teknik analisis *Regresi Linier* berganda, menunjukkan bahwa

¹⁵ Abd Muis, *Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan (studi Pengembangan Ekowisatawan di Kabupaten Penajam Paser Utara)*, Vol. 4 no. 2 (2016)

penanaman modal asing juga mampu meningkatkan jumlah cadangan devisa di Indonesia.

Berkaitan dengan hasil penelitian dalam jurnal tentang pengaruh investor dan juga kurs dolar, maka berkaitan juga dengan fokus penelitian yang sedang peneliti bahas, yakni devisa negara menjadi salah satu faktor internal pemerintah dalam kebijakan bebas visa. Perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu yang diambil, objek penelitiannya adalah devisa negara. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti tulis objek penelitiannya pemerintah dan negara. Kemudian dapat disimpulkan bahwa negara harus bisa menjaga stabilitas perekonomian. Dengan memberikan penawaran berupa kebijakan bebas visa, menjadi salah satu daya tarik untuk dapat menambah investor di Indonesia.¹⁶

Kelima, dalam jurnal Ahmad Jazuli yang berjudul **Implementasi Kebijakan Bebas Visa dalam Prespektif Keimigrasian**. Dalam jurnal diatas, penulis menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif (mixed methods) untuk mengamati implementasi kebijakan bebas visa dalam prespektif keimigrasian. Bebas Visa adalah salah satu kebijakan yang telah diimplementasikan dalam tiga tahap melalui Peraturan Presiden No. 69/2015 (30 negara) hingga Peraturan Presiden No. 21/2016 (169 negara). Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan terkait upaya badan keimigrasian dalam kebijakan bebas visa hingga kendala apa yang dihadapi. Kesimpulan yang didapat adalah upaya yang dilakukan oleh imigrasi yaitu pengawasan dan kerjasama dengan

¹⁶ luh Made Trisna Meita Murni Lestari dan I wayan Yogi Swara, *Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Cadangan Devisa di Indonesia (Studi Sebelum dan Sesudah Krisis Global)*, Jurnal Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana

instansi terkait, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan intelijen serta memperkuat sistem perlintasan bandar udara, pos lintas batas dan pelabuhan laut. Untuk kendala yang dihadapi yakni kurangnya kualitas maupun kuantitas yang dimiliki oleh sumber daya manusianya hingga kurangnya pengetahuan intelijen imigrasi serta kurangnya sosialisasi bebas visa.

Adapun persamaan dalam jurnal Ahmad Jazul adalah sama-sama menganalisis kebijakan bebas visa, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang diambil yakni implementasi keimigrasian dengan alasan pemerintah menambah jumlah negara dalam kebijakan bebas visa.¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, menggambarkan bahwa kebijakan suatu negara merupakan gambaran keadaan maupun potensi yang dimiliki oleh negara. Adapun persamaan maupun perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan skripsi ini tentu akan berpengaruh dengan hasil penelitian yang diperoleh. Jika pada penelitian sebelumnya ditujukan untuk memperoleh data hingga langkah-langkah dalam pencapaian hasil kebijakan bebas visa diberlakukan, maka dalam penelitian ini diharapkan untuk dapat menguraikan alasan pemerintah menambah daftar negara dalam kebijakan bebas visa serta faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan bebas visa di Indonesia.

¹⁷ Ahmad Jazuli, *Implementasi kebijakan Bebas Visa dalam perspektif Keimigrasian*, Jurnal Ilmiah Hukum Internasional, Volume 10, Nomor 3 (2016)

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No.	Judul dan Nama Penelitian	Jenis Penelitian dan Teori/Konsep	Hasil Penelitian
1.	Sinta Kartika Kusuma Dewi, <i>Analisa Kebijakan Pembatalan Intervensi Militer Amerika Serikat ke Suriah di Era Barack Obama</i> , Skripsi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang	Eksplanatif <i>Adaptive Model of Foreign Policy</i>	Amerika Serikat membatalkan kebijakan intervensi militer ke Suriah di era Barack Obama dikarenakan faktor internal dan juga eksternal. Faktor eksternal adalah adanya negara <i>free rider</i> , negara pemasok senjata bagi Suriah dan keterlibatan organisasi terorisme internasional yang mengancam sekutu. Kemudian faktor internalnya adalah tidak adanya dukungan kongres dan tuntutan masyarakat Amerika Serikat.
2.	Maria Imelda Ayudihta Loda, <i>Pengaruh Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Indonesia Terhadap Daya Saing Pariwisata Indonesia di Kawasan Asia Tenggara</i> Skripsi Hubungan Internasional Universitas Pasundan Bandung	Deskriptif Liberalis Interpendensi Kepentingan Nasional Kebijakan Luar Negeri	Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Indonesia diterapkan dan diberikan bagi banyak negara yang memiliki minat wisata tinggi, dengan begitu dapat meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di Kawasan Asia Tenggara, dilihat dari jumlah kunjungan yang terus meningkat.
3.	Abd Muis, <i>Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan (studi Pengembangan</i>	Deskriptif Kualitatif	Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Ekonomi melalui sektor pariwisata, maka dibutuhkan

	<i>Ekowisatawan di Kabupaten Penajam Paser Utara</i>), Vol. 4 no. 2 (2016)		peran setiap lembaga yang bersangkutan. Dinas pariwisata merupakan komponen yang utama dalam Pariwisata, meningkatkan daya tarik wisatawan dengan memberikan inovasi-inovasi melalui pembangunan atau pembaruan objek wisata.
4.	luh Made Trisna Meita Murni Lestari dan I wayan Yogi Swara, <i>Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Cadangan Devisa di Indonesia (Studi Sebelum dan Sesudah Krisis Global)</i> , Jurnal Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana	Deskriptif Analisis Regris Linier	Untuk mampu bersaing dengan perdagangan bebas saat ini, negara harus mempunyai pondasi yang kuat. Cadangan devisa negara merupakan salah satu pondasi yang setidaknya dapat digunakan saat krisis global melanda. Dengan begitu, negara harus mampu menjaga kestabilan ekonomi karena penanaman modal asing mempunyai peran yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia.
5.	Ahmad Jazuli, <i>Implementasi kebijakan Bebas Visa dalam perspektif Keimigrasian</i> , Jurnal Ilmiah Hukum Internasional, Volume 10, Nomor 3 (2016)	Pendekatan kuantitatif dan kualitatif	Dalam penelitian yang dilakukan diketahui bahwa jajaran keimigrasian telah siap dalam mengimplementasikan kebijakan bebas visa terlihat dengan upaya yang dilakukan

			<p>berupa: sosialisasi dan peningkatan pengawasan di semua wilayah kerja; melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam hal pengawasan orang asing sampai tingkat RT/RW dan membentuk sekretariat tim PORA; melakukan peningkatan kompetensi SDM, sarpras, dan intelijen; memperkuat sistem perlintasan orang asing mulai dari bandar udara, pos lintas batas dan pelabuhan laut, namun memang masih terdapat kekurangan atau belum maksimalnya kinerja UPT keimigrasian dalam mengimplementasikan kebijakan bebas visa tersebut;</p>
6.	<p>Gabriella Bety Arutsya, <i>Alasan Pemerintah Menambah Jumlah Negara Penerima Kebijakan Bebas Visa 2016</i>, Skripsi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang.</p>	<p>Eksplanatif Adaptation Model of Foreign Policy – Intrasegment Adaption Model</p>	<p>Dalam penelitian ini penulis mencoba menjelaskan mengenai alasan Indonesia meningkatkan jumlah negara penerima bebas visa. Alasan tersebut datang dari tuntutan internal negara Indonesia.</p>

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 *The Adaptive Model of Foreign Policy*

Dalam perumusan politik luar negeri, para pakar akademisi mengembangkan pendekatan-pendekatan dan model-model pembuatan keputusan politik luar negeri. Melalui beberapa model pendekatan yang diberikan setidaknya mampu memberikan gambaran pengambilan keputusan dengan kemungkinan alternatif yang ada untuk kehidupan suatu negara yang berkelanjutan. Model pendekatan yang dimaksud salah satunya adalah Adaptif Model (*The Adaptive Model*).¹⁸ Para teoritis memilih untuk berfokus pada respon negara yang disebabkan kendala maupun kesempatan yang dimiliki negara dengan berusaha menekan menekan ciri-ciri lingkungan sehingga akan menimbulkan suatu hubungan sebab-akibat.¹⁹

Kebijakan luar negeri suatu negara dikeluarkan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Tujuan yang dimaksud adalah kepentingan negara itu sendiri. Kebijakan suatu negara dibuat untuk melindungi segala aspek yang terdapat dalam suatu negara, misalnya masyarakat maupun aset-aset negara. sehingga, kebijakan luar negeri tersebut seringkali diambil berdasarkan bagaimana kondisi dan tuntutan dan tuntutan yang berasal dari dalam negara menghadapi system internasional.

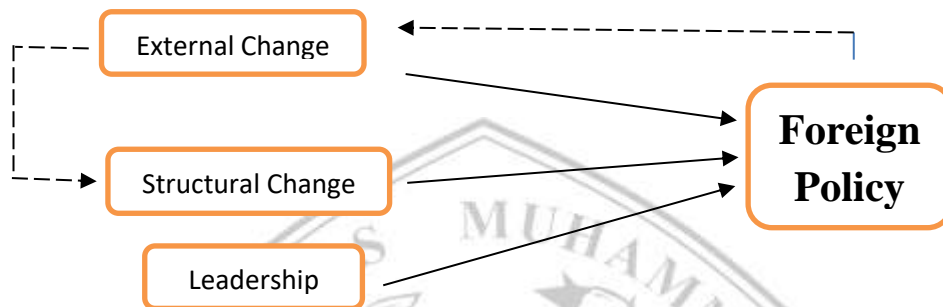
Model analisa pengambilan kebijakan luar negeri *The Adaptive Model* oleh Rosenau menjelaskan mengenai sebab dan akibat dari suatu keadaan dari faktor-

¹⁸ Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochammad Yani, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hal 60.

¹⁹ Ibid., hal 66.

faktor tersebut mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara yang disimpulkan melalui tabel berikut;

Gambar 1.1
Model Adaptif Politik Luar Negeri²⁰



Sumber: James N. Rosenau, *Comparing Foreign Policy : Theories, Findings, and Methods*. New York: Sage Publications, 1974, hal 47, dalam Anak Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, 2006, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung, Rosdakarya

Skema model adaptif menjelaskan bahwa politik luar negeri merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dan lingkungan internal (perubahan struktural). Dengan kata lain, tindakan politik luar negeri suatu negara pada waktu tertentu merupakan penjumlahan variabel independen, yaitu perubahan eksternal dan struktural (internal). Dalam perumusan teori tersebut menjelaskan apabila kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari respon negara terhadap perubahan eksternal, tuntutan internal negara dan kepemimpinan negara dalam suatu waktu sebagai proses adaptasi. Pembagian faktor eksternal menurut Rosenau merupakan hubungan antar negara dan juga kondisi internasional

²⁰ James N. Rosenau, *Comparing Foreign Policy : Theories, Findings, and Methods*. New York: Sage Publications, 1974, hal 47, dalam Anak Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, 2006, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung, Rosdakarya, hal 57.

yang sedang terjadi. Sedangkan faktor internal yang dimaksud merupakan hal-hal dari dalam negara yang berpengaruh dalam kebijakan luar negeri. Faktor-faktor tersebut seperti masyarakat, struktur pemerintahan, dan kepemimpinan individu kaum elit pada waktu tertentu yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan luar negeri tersebut.²¹

Prespektif adaptif diartikan bahwa negara-bangsa dipandang sebagai suatu entitas yang selalu melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Maka dalam prespektif adaptif ini dijelaskan bahwa proses adaptasi suatu negara merupakan respon negara terhadap perubahan lingkungan dengan menyeimbangkan tuntutan eksternal dengan tekanan internal.²²

Perubahan dalam kebijakan ini sering kali terjadi melihat kondisi eksternal yang berkembang menjadikan tuntutan lingkungan internal bertambah sehingga hal tersebut menimbulkan tantangan bagi keduanya. Maka Rosenau menjadikan pola adaptasi untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Pola adaptasi dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri terdiri dari 4 model, yaitu: pertama, *Preservative Adaptation*, yakni kebijakan luar negeri merupakan sebab akibat dari keadaan maupun perubahan eksternal dan internal negara. Kedua *Acquiescent Adaptation*, merupakan kebijakan sebab akibat suatu negara merupakan tuntutan maupun keadaan eksternal dan internal. Ketiga *Intrasigent Adaptation*, yaitu kebijakan sebab akibat negara dari keadaan dan tuntutan internal

²¹Ibid.,

²² Ibid.,

negara. Keempat *Promotive Adaptation*, yakni negara tidak merespon tuntutan maupun keadaan yang disebabkan oleh internal maupun eksternal negara.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori kebijakan luar negeri yang telah dirumuskan Rosenau dan menyimpulkannya kedalam salah satu model klasifikasi tersebut. Pola yang sesuai dengan fenomena atau kasus yang diteliti adalah *Intrasignment Adaptation*. Model ini menurut peneliti sesuai dengan kasus perubahan kebijakan bebas visa Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi.

Menurut Rosenau, faktor eksternal atau disebut sumber sistemik (*systemis sources*) merupakan struktur hubungan antara negara-negara besar, pola-pola aliansi yang terbentuk antara negara-negara dan faktor situasional yang dapat berupa isu area atau krisis.²³ Sedangkan faktor internal yang dimaksud adalah hal-hal yang berasal dari dalam negara dan dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri. Adapun faktor-faktor tersebut adalah masyarakat (*societal sources*), pemerintahan (*governmental sources*), kepribadian kaum elit politik (*indisyncratic sources*). Selain empat faktor tersebut terdapat beberapa faktor lain seperti faktor ukuran wilayah negara dan jumlah penduduk, lokasi geografi, serta teknologi yang dapat masuk ke dalam kategori *systemis* atau *societal sources*. Dengan banyaknya faktor, Rosenau menyarankan untuk memilih dan menggabungkan faktor mana yang paling penting dan patut diberi perhatian dalam menjelaskan politik luar negeri suatu negara yang diteliti.²⁴

²³ Anak Agung Banyu Perwita. *Op. Cit.*, Hal. 57.

²⁴ Ibid.,

Intrasignment Adaptation adalah suatu respon negara terhadap tuntutan maupun keadaan internal negara. Adapun beberapa sumber dari lingkungan internal adalah yang pertama adalah sumber masyarakat (*societal sources*) yang mencakup faktor kebudayaan dan sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial dan perubahan opini publik. Hal tersebut dapat mendasari kepentingan negara tersebut untuk berhubungan dengan negara lain. Struktur sosial mencakup sumberdaya manusia yang dimiliki suatu negara. Selain itu salah satu sumber lainnya adalah pemerintahan (*governmental sources*) yang menjelaskan tentang struktur dalam pemerintahan.²⁵

Penerapan indikator eksternal dan internal menurut James N. Rosenau dalam penelitian ini dijabarkan oleh peneliti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Tabel Indikator Internal dan Eksternal

Internal		Eksternal
Masyarakat (<i>Societal Sources</i>)	Kepemimpinan/ <i>Leadership</i>	<ul style="list-style-type: none"> Faktor Situasional berupa isu atau krisis
<ul style="list-style-type: none"> Letak Geografis Indonesia Jumlah Penduduk Pembangunan Ekonomi melalui sektor Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> Perilaku terhadap kebijakan luar negeri 	

Sumber: tabel dibuat berdasarkan penerapan teori dalam kasus yang sedang diteliti

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Rosenau yakni kebijakan yang diambil berdasarkan pengaruh

²⁵ Ibid., hal 57

eksternal dimana Indonesia menjadikan negara-negara seperti Singapura, Malaysia dan Thailand sebagai acuan untuk dapat meraih keuntungan bagi negaranya melalui sektor Pariwisata. Dorongan internal yang dimaksud adalah Indonesia dengan letak geografis yang strategis dan jumlah penduduk yang memadai dapat dimanfaatkan pemerintah dalam upaya pengembangan sektor pariwisata. Dengan tujuan peningkatan devisa hingga penyerapan tenaga kerja.

Dalam karya ilmiah ini penulis menyimpulkan kedalam salah satu model klasifikasi. Pola yang sesuai dengan fenomena atau kasus yang diteliti adalah *Intrasignment Adaptation* yang sesuai dengan alasan pemerintah Indonesia memberikan kebijakan bebas visa lebih berfokus pada keadaan internal negara. Pemerintah Indonesia kembali memutuskan menambah daftar negara penerima kebijakan bebas visa yang dituangkan melalui Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2016 menjadi 169 negara. Keputusan pemerintah tersebut merupakan salah satu indikator pemerintah dalam mendasari kepentingan negara untuk berhubungan dengan negara lain. Ditambahnya jumlah negara dalam kebijakan tersebut didorong dengan adanya faktor internal yang terjadi pada negara Indonesia, yaitu Letak geografis, jumlah penduduk, pengembangan sektor pariwisata dengan tujuan peningkatan devisa negara dan penyerapan tenaga kerja. Faktor internal yang dimaksud adalah faktor pembangunan ekonomi dimana yang dimaksud dalam pembangunan ekonomi mencakup kemampuan suatu negara untuk mencapai kesejahteraannya sendiri. yakni devisa negara yang perlu ditingkatkan dilihat dari adanya peluang di tiap tahunnya, dimana salah satu penyumbang devisa melalui sektor pariwisata. Dengan begitu, akan mempermudah pembangunan negara

sehingga akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang dapat mewujudkan kesejahteraan warga negara Indonesia.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya berupa kata-kata atau teks.²⁶ Dalam penelitian ini data yang kumpulkan berupa grafik, angka maupun teks.

1.7.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatif, yakni metode penelitian yang akan menjelaskan hubungan sebab akibat lebih dari satu fenomena sesuai dengan teori yang digunakan.²⁷ Dalam buku metode penelitian oleh Dr. Ulber Silalahi, metode ekplanasi merupakan metode yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan dua atau lebih variabel melalui pertanyaan yang mendasar yakni “mengapa” dengan berusaha mendapatkan fakta yang teliti dan lengkap.²⁸ Melalui penelitian yang sedang diteliti, maka peneliti akan menjelaskan tentang alasan mengapa pemerintah menambah jumlah negara penerima kebijakan bebas visa.

1.7.3 Level Analisa

²⁶ Uber Sialahi, 2012, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refrika Aditama, hal 339.

²⁷ Ibid., hal 31

²⁸ Ibid., hal 26

Terdapat 2 unit penelitian yang difokuskan dalam penelitian ini, yakni unit analisa dan unit ekplanasi. Sesuai dengan hubungan kedua unit penelitian ini yang sama-sama negara-bangsa, maka penelitian ini masuk pada tingkatan korelasionis.²⁹ Dimana unit eksplanasinya adalah pengertian Kebijakan Bebas Visa Indonesia dan isi Peraturan Presiden tentang Kebijakan Bebas Visa. Sedangkan, unit analisanya adalah alasan apa saja yang mendasari pemerintah Indonesia menambah daftar negara penerima Kebijakan Bebas Visa hingga terjadi tiga kali perubahan Peraturan Presiden tentang Penambahan Daftar Negara dalam kurun waktu satu tahun pada tahun 2016

1.7.4 Ruang Lingkup Penelitian Materi dan Waktu

a. Batasan Waktu

Untuk menghindari terjadinya masa waktu yang cukup lama maka penelitian ini dibutuhkan batasan waktu dimulai dari perubahan terakhir Peraturan Presiden nomor 69 tahun 2015 hingga pembaharuan Peraturan Presiden dalam peraturan nomor 21 tahun 2016.

b. Batasan Materi

Mengenai batasan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis berfokus pada pengertian Kebijakan Bebas Visa, menjelaskan isi dari Peraturan Presiden tentang Kebijakan Bebas Visa serta alasan apa saja

²⁹ Mohtar Masoed, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional* : Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LPJES, hal 308

yang mendorong pemerintah Indonesia menambah daftar negara penerima Kebijakan Bebas Visa.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data *studi pustaka*, dengan pengumpulan data primer berupa data-data resmi dari instansi pemerintah dan sekunder, juga dengan data yang berupa buku, berita dalam bentuk cetak hingga *digital* maupun website yang terkait dengan materi yang sedang diteliti.

1.8 Hipotesis

Sesuai dalam teori *Adaptive Model* menurut James N. Rosenau, dimana kebijakan suatu negara merupakan respon negara terhadap tuntutan eksternal maupun keadaan internal negara. Indonesia menambah jumlah negara penerima kebijakan bebas visa Indonesia ditahun 2016 yang sebelumnya 45 negara menjadi 169 negara dengan tiga kali perubahan. Penambahan daftar penerima fasilitas bebas visa tersebut dilandasi dengan dorongan faktor eksternal dimana persaingan pariwisata Indonesia dengan beberapa Negara di kawasan Asia menjadi salah satu indikator yang menjadi fokus pemerintah Indonesia dan didukung dengan keadaan internal Indonesia yang memiliki letak geografis yang strategis serta jumlah penduduk yang memadai dapat dimanfaatkan pemerintah dalam peningkatan perekonomian melalui sektor pariwisata. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja sehingga akan menekan angka pengangguran. Tujuan dari penerapan

kebijakan bebas visa Indonesia sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara Indonesia.

1.9 Sistematika Penulisan

Tabel 1.3 Tabel Sistematika Penulisan

BAB I	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Penelitian 1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat Akademis 1.4.2 Manfaat Praktis 1.5 Penelitian Terdahulu 1.6 Kerangka Teori 1.7 Metodologi Penelitian 1.7.1 Jenis Penelitian 1.7.2 Metodologi Penelitian 1.7.3 Level Analisa 1.7.4 Ruang Lingkup Penelitian 1.7.5 Teknik Pengumpulan Data 1.8 Hipotesa 1.9 Sistematika Penulisan
BAB II ISI	Kebijakan Bebas Visa di Indonesia 2.1 Pengertian Kebijakan Bebas Visa 2.1.1 Pengertian Kebijakan Bebas Visa 2.1.2 Kebijakan Imigrasi Indonesia 2.1.3 Prosedur Permohonan Visa Kunjungan 2.2 Sejarah Kebijakan Bebas Visa

